
MENJUNJUNG ILMU SEBAGAI MAHKOTA PERADABAN: Paradigma *Makuta Ilmu* dan Masa Depan Keilmuan UIN Sultan Amai Gorontalo

Donald Qomaidiasyah Tungkagi
donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

§§§

Abstrak

Transformasi IAIN menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2026 menuntut loncatan paradigma keilmuan, bukan sekadar perubahan status administratif. Penetapan lambang universitas melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7920 Tahun 2026 yang menjadikan Makuta Gorontalo sebagai bentuk utama logo memperkuat relevansi tawaran paradigma “Makuta Ilmu”. Artikel ini menjawab pertanyaan, bagaimana struktur ontologi, epistemologi, dan aksiologi Makuta Ilmu dapat dirumuskan secara integratif dan dipertanggungjawabkan dalam pengembangan keilmuan UIN Sultan Amai Gorontalo? Penelitian menggunakan analisis konseptual-filosofis terhadap teks budaya, falsafah *Adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kuru’ani*, konsep *Buatulo Toulongo*, serta komparasi paradigma keilmuan UIN di Indonesia. Temuan menunjukkan Makuta Ilmu memiliki struktur ontologis teo-antropo-kosmosentris; epistemologi integratif-dialektis yang menghubungkan wahyu, rasio, empiris, dan budaya; serta aksiologi yang menempatkan ilmu sebagai mahkota peradaban untuk keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Paradigma ini berbeda dari paradigma UIN lain karena berangkat dari struktur sosial-budaya Gorontalo. Kontribusinya adalah memperkaya diskursus epistemologi PTKIN dan memberikan dasar bagi kurikulum, riset, serta pengabdian berbasis kearifan lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa Makuta Ilmu adalah tawaran paradigma yang terbuka untuk didialogkan, dikritik, dan disempurnakan.

Kata kunci: aksiologi; epistemologi; integrasi ilmu; Makuta Ilmu; ontologi

Abstract

*The transformation of IAIN into UIN Sultan Amai Gorontalo through Presidential Regulation Number 48 of 2026 demands an epistemological leap, not merely an administrative change. The establishment of the university’s emblem through Decree of the Director General of Islamic Education Number 7920 of 2026, which makes the Gorontalo Makuta the main form of the logo, strengthens the relevance of the “Makuta Ilmu” paradigm. This article addresses the question: how can the ontological, epistemological, and axiological structures of Makuta Ilmu be formulated integratively and accountably in the scientific development of UIN Sultan Amai Gorontalo? The study employs conceptual-philosophical analysis of cultural texts, the philosophy of *Adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kuru’ani*, the concept of *Buatulo Toulongo*, and comparison of*

scientific paradigms of UINs in Indonesia. The findings show that Makuta Ilmu has a theo-anthropo-cosmoscentric ontological structure; an integrative-dialectical epistemology connecting revelation, reason, empirical experience, and culture; and an axiology that positions knowledge as the crown of civilization for justice, humanity, and sustainability. This paradigm differs from other UIN paradigms because it derives from Gorontalo's socio-cultural structure. Its contribution is to enrich the epistemological discourse of PTKIN and provide a basis for curriculum, research, and community service based on local wisdom. The article concludes that Makuta Ilmu is a paradigmatic offer open to dialogue, critique, and refinement.

Keywords: *axiology; epistemology; integration of knowledge; Makuta Ilmu; ontology*

§§§

PENDAHULUAN

Perubahan bentuk perguruan tinggi Islam dari institut menjadi universitas tidak pernah netral secara epistemologis, karena perluasan disiplin menimbulkan pertanyaan tentang cara ilmu agama, ilmu sosial-humaniora, dan ilmu alam ditempatkan dalam satu tatanan pengetahuan. Diantara persoalan fundamental pendidikan tinggi Islam adalah warisan dikotomi yang memperlakukan ilmu agama dan ilmu umum sebagai dua dunia terpisah, padahal tradisi intelektual Islam pada dasarnya tidak mengenal pemisahan ilmu (Bahri, 2012, pp. 38–40). Pengalaman UIN Suska Riau juga memperlihatkan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN menjadikan integrasi sains dan agama sebagai cita-cita institusional, sebab pemisahan ontologis, epistemologis, dan aksiologis menyebabkan sains kehilangan dimensi spiritual sementara studi agama berisiko kehilangan kontak dengan realitas kontemporer (Helmiati et al., 2017, pp. 3–4). Sehingga demikian, paradigma keilmuan bukan sekadar hiasan konseptual yang ditempelkan setelah perubahan status, melainkan kerangka yang memberi orientasi tentang apa yang dianggap nyata, bagaimana pengetahuan yang sah diperoleh, dan untuk tujuan apa ilmu dikembangkan (Kuhn, 1970, pp. 10–11; Nur, 2018, pp. 1–3). Karena itu, lahirnya UIN Sultan Amai Gorontalo membuka kebutuhan akademik untuk merumuskan suatu orientasi keilmuan yang mampu mengikat keluasan disiplin tanpa menghilangkan identitas Islam maupun kekhasan Gorontalo (Tungkagi, 2026a, pp. 1–2; Tungkagi, 2026b, pp. 1–2).

Kebutuhan tersebut semakin penting apabila dicermati bahwa IAIN Sultan Amai Gorontalo sebenarnya telah memiliki rumusan paradigma keilmuan yang relatif matang sebagaimana termaktub dalam *Proposal Transformasi IAIN Menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo*. Dokumen tersebut menawarkan paradigma *antropokosmoteosentris*, yaitu paradigma yang berpusat pada manusia, alam, dan Tuhan, serta menegaskan bahwa sains (*acquired knowledge*) dan wahyu (*revealed knowledge*) tidak ditempatkan pada garis kontradiktif, melainkan dialogis, integratif-interkoneksi (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 17–19). Dengan demikian, tawaran Makuta Ilmu tidak berangkat dari kekosongan konseptual, melainkan memperjelas, memberi bentuk simbolik, dan memperluas operasionalisasi paradigma yang telah dirumuskan dalam dokumen transformasi kelembagaan tersebut.

Jik kita cermati paradigma integrasi di lingkungan UIN Indonesia yang telah berkembang dalam beragam bentuk dan metafora, mulai dari integrasi-interkoneksi, pohon ilmu, *twin towers*, *wahdatul 'ulum*, gunung ilmu, harmonisasi ilmu, mutiara keilmuan, dan lain sebagainya. Misalnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan UIN Sunan Kalijaga sama-sama berangkat dari upaya mendamaikan Islam dan sains, tetapi menempuh tekanan epistemologis yang berbeda melalui islamisasi, integrasi, dan interkoneksi (Hidayah, Tobroni, & Faridi, 2023, pp. 306–309). UIN Surakarta melalui paradigma “Gunungan Ilmu” mengintegrasikan keilmuan ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman, lalu menerjemahkannya ke dalam nilai moderasi, inteligensi, dan transformasi sebagai profil lulusan (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Sementara itu, tetangga UIN Sultan Amai Gorontalo yakni UIN Datokarama Palu dengan metafora “Mutiara Keilmuan”, tidak sekadar bersifat estetis, tetapi dimaksudkan sebagai proses pemaknaan ilmu yang menghubungkan wahyu, akal, realitas sosial, dan tanggung jawab moral (Thahir, 2025, pp. 5, 9–10). Keragaman ini menunjukkan bahwa integrasi keilmuan bukan formula tunggal, melainkan proses institusional untuk membangun distingsi akademik berdasarkan sejarah, kebutuhan, dan horizon budaya masing-masing universitas.

Dalam kerangka itulah, Gorontalo menyediakan sumber simbolik dan intelektual yang layak dibaca bukan semata sebagai objek *folklor*, tetapi sebagai bahan refleksi epistemologis. Falsafah *Adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kuru'ani* menempatkan adat, syariat, dan Al-Qur'an dalam relasi normatif yang saling meneguhkan, sekaligus memperlihatkan bagaimana agama hidup melalui institusi dan kebudayaan setempat (Kau, 2019). Struktur *Buatulo Toulongo* yang mempertemukan unsur pemerintah, agama, dan adat dapat pula dibaca sebagai bentuk pembagian otoritas sosial yang mencegah satu sumber legitimasi menguasai seluruh kehidupan bersama (Kango & Tungkagi, 2026). Dalam perspektif epistemologi sosial, struktur semacam itu penting karena pengetahuan tidak pernah lahir hanya dari pikiran individu, tetapi juga dari institusi, tradisi, dan praktik yang menentukan siapa yang dipercaya, bagaimana suatu klaim diuji, serta untuk kepentingan apa pengetahuan dipergunakan (Bourdieu, 1977; Scott, 2014). Karena itu, gagasan “Makuta Ilmu” perlu dibangun dengan mempertemukan sumber normatif Islam, rasionalitas akademik modern, pengalaman empiris, dan struktur pengetahuan lokal Gorontalo, bukan dengan mengisolasi salah satunya sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

Perkembangan terbaru yang memperkuat relevansi pembahasan adalah penetapan lambang resmi UIN Sultan Amai Gorontalo melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7920 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 23 September 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa lambang secara utuh berbentuk Tudung Makuta Gorontalo sebagai bentuk utama yang menunjukkan identitas kedaerahan dan menegaskan keberadaan universitas di tanah Gorontalo, sementara *makuta* (mahkota) secara filosofis merepresentasikan kehormatan, kearifan, dan kepemimpinan. Di dalam bentuk yang sama, kitab atau Al-Qur'an dimaknai sebagai sumber utama nilai dan ilmu, kubah masjid sebagai pusat ibadah dan majelis ilmu, serta pena sebagai simbol pembelajaran, literasi, pengembangan ilmu, pemikiran kritis, dan transformasi yang menjembatani teori dengan praktik. Simbol sirkuit elektronik, atom, dan sinyal diskret menegaskan komitmen pada IPTEK dan transformasi digital, sedangkan daun merepresentasikan pertumbuhan,

regenerasi intelektual, kepedulian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, identitas visual resmi universitas telah memuat kosakata simbolik yang sangat dekat dengan problem integrasi keilmuan, wahyu, ibadah, literasi, sains-teknologi, transformasi, dan keberlanjutan.

Namun, hubungan antara lambang resmi dan paradigma keilmuan harus dibaca dengan hati-hati agar tidak terjadi lompatan argumentasi. Keputusan Direktur Jenderal tersebut menetapkan makna lambang untuk administrasi, komunikasi, dan identitas universitas; dokumen itu tidak menetapkan “Makuta Ilmu” sebagai paradigma akademik resmi. Oleh sebab itu, artikel ini tidak menjadikan logo sebagai bukti bahwa paradigma Makuta Ilmu telah selesai atau telah disahkan, melainkan sebagai fakta institusional yang memperkuat relevansi “tawaran” pemilihan *makuta* sebagai metafora epistemologis. Kehati-hatian ini penting karena paradigma, dalam pengertian Kuhn, terbentuk melalui penerimaan, praktik, *problem-solving*, dan konsensus komunitas ilmiah, bukan semata melalui deklarasi simbolik atau keputusan administratif (Kuhn, 1970). Pengalaman Wahdatul ‘Ulum bahkan menunjukkan bahwa paradigma khas universitas lahir melalui diskusi bertahun-tahun, seminar, lokakarya, dan *focus group discussion* sebelum memperoleh bentuk yang relatif mapan (Fridiyanto, 2019, pp. 149–150). Maka, Makuta Ilmu seharusnya dipahami sebagai *research programme* institusional yang terbuka untuk diperdebatkan, diuji, dan diterjemahkan secara bertahap, bukan sebagai dogma yang selesai sejak awal.

Masalah akademik yang hendak dijawab bukan sekadar “apa simbol terbaik” bagi UIN Sultan Amai Gorontalo, tetapi bagaimana suatu simbol lokal dapat ditransformasikan secara bertanggung jawab menjadi bangunan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. UIN Raden Intan Lampung memberi contoh bahwa lambang dan budaya lokal mahkota “Siger Lampung” yang menginspirasi logo, dapat menjadi sumber konseptual bagi filsafat keilmuan apabila hubungan simbol dengan struktur ilmu dijelaskan secara eksplisit, seperti Bahtera Ilmu Integratif-Prismatik yang menghubungkan ayat *qauliyyah* dan *kauniyyah*, agama dan sains, individu dan sosial, manusia dan alam, serta syariat dan akhlak dalam horizon tauhid (Nur, 2018, pp. 8–12). Gunung Ilmu Surakarta juga memperlihatkan bahwa simbol budaya baru produktif secara akademik ketika diterjemahkan ke dalam asumsi dasar, objek kajian, metode, analisis, nilai, hasil, dan representasi keilmuan (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8, 34). Pada ukuran yang sama, *Makuta* tidak sekadar cukup dibanggakan karena berasal dari Gorontalo, ia harus mampu menjawab pertanyaan filosofis tentang struktur realitas, sumber pengetahuan, prosedur pembenaran, etika ilmu, serta konsekuensi kurikuler dan riset. Artikel ini karena itu, berusaha menggeser pembicaraan dari simbolisme identitas menuju argumentasi filsafat ilmu yang dapat diuji.

Secara teoritis, artikel ini berpijak pada asumsi bahwa integrasi keilmuan tidak identik dengan pencampuran disiplin. Integrasi adalah dialog epistemologis yang saling memperkaya tanpa menghilangkan identitas disiplin, sedangkan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dapat dipakai sebagai modus kerja untuk menjawab persoalan kompleks (Thahir, 2025, pp. 9–10). Abdullah mengembangkan integrasi-interkoneksi sebagai upaya keluar dari isolasi bidang-bidang pengetahuan, sehingga agama tidak terjebak dalam normativitas tertutup dan sains tidak berjalan tanpa orientasi etik-spiritual (Abdullah, 2006, pp. 219–223). Dalam kerangka ini, wahyu, akal, pengalaman, dan kebudayaan bukan sumber yang harus dilebur menjadi satu metode, melainkan sumber yang memiliki otoritas, batas, dan cara kerja berbeda

tetapi dapat dipertemukan pada problem yang sama (Barbour, 1971, pp. 76–79; Kartanegara, 2005, pp. 47–53). Posisi tersebut menghindarkan Makuta Ilmu dari dua ekstrem, yaitu reduksionisme positivistik yang hanya mengakui fakta empiris dan reduksionisme tekstual yang memaksa seluruh realitas kompleks selesai hanya dengan kutipan normatif (Rahman, 1982).

Di sisi lain, artikel ini juga berangkat dari kesadaran bahwa paradigma keilmuan memiliki dimensi kekuasaan dan pembentukan subjek. Saat membaca Twin Towers UIN Sunan Ampel melalui perspektif Foucault, kita diingatkan bahwa paradigma dapat menjadi pola sistematis yang mengarahkan kurikulum dan perilaku akademik, sehingga ia berpotensi produktif tetapi juga dapat berubah menjadi perangkat disipliner apabila diterapkan secara kaku (Firdaus, Maulana, & Aris, 2022, pp. 122–126). Karena itu, Makuta Ilmu tidak boleh menjadi instrumen penyeragaman tema penelitian atau kewajiban artifisial untuk memasukkan istilah Gorontalo ke semua mata kuliah, sebab praktik demikian justru mengubah paradigma menjadi jargon administratif. Kita bisa belajar dari Harmonisasi Ilmu UIN K.H. Abdurrahman Wahid bahwa paradigma baru menjadi bermakna jika diterjemahkan ke dalam kurikulum, pedagogi, penelitian, dan budaya akademik secara berimbang, bukan hanya ditampilkan pada dokumen visi (Aryaningtyas et al., 2025, pp. 34–37; Mazidah et al., 2026, pp. 96–99). Dengan demikian, ukuran keberhasilan Makuta Ilmu bukan frekuensi penyebutan istilah “makuta”, melainkan kualitas dialog antardisiplin, ketajaman riset, kedalaman etika akademik, dan kemampuan ilmu menyelesaikan masalah masyarakat (Kuntowijoyo, 2006; Sakdiah et al., 2025).

Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana struktur ontologis Makuta Ilmu dapat dirumuskan sehingga tauhid tetap menjadi horizon metafisis tanpa meniadakan otonomi realitas manusia dan alam sebagai objek ilmu. Kedua, bagaimana struktur epistemologisnya menghubungkan wahyu, akal, empiris, dan budaya tanpa jatuh pada sinkretisme atau hierarki kaku. Ketiga, bagaimana struktur aksiologisnya menempatkan ilmu sebagai mahkota peradaban yang menghasilkan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan, moderasi, inovasi, dan keberlanjutan. Tiga pertanyaan ini selaras dengan cara sejumlah paradigma UIN membangun filsafat ilmu mereka melalui kategori ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tetapi artikel ini menambahkan perhatian pada basis budaya Gorontalo dan resonansinya dengan identitas resmi universitas. Tujuan akhirnya adalah menawarkan rumusan konseptual yang cukup terbuka untuk dikritik namun cukup konkret untuk diturunkan ke arah kurikulum, riset, dan pengabdian. Dengan kerangka demikian, ilmu benar-benar “dijunjung” bukan karena ditempatkan di atas kritik, melainkan karena diperlakukan sebagai amanah intelektual yang harus terus diperiksa dan diarahkan pada kemaslahatan peradaban (al-Faruqi, 1982; Kuntowijoyo, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan orientasi analisis konseptual-filosofis. Pilihan tersebut sesuai dengan sifat masalah yang tidak menguji hubungan kausal empiris, tetapi berusaha merumuskan struktur pemikiran dari berbagai teks, dokumen, dan model paradigma keilmuan yang telah berkembang di perguruan tinggi Islam (Nur, 2018; Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022). Studi kepustakaan juga digunakan pada kajian Harmonisasi Ilmu, Wahdatul ‘Ulum, dan konfigurasi paradigma UIN K.H. Abdurrahman Wahid untuk menelaah

dokumen kelembagaan, literatur keilmuan, kurikulum, dan publikasi akademik (Mazidah et al., 2026, pp. 96–97; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 34–35). Dalam penelitian ini, objek formalnya adalah “Makuta Ilmu” sebagai konstruksi paradigma, sedangkan objek materialnya mencakup simbol Makuta dalam keputusan lambang UIN Sultan Amai Gorontalo, falsafah Gorontalo, model integrasi keilmuan PTKIN, dan kerangka filsafat ilmu yang membahas relasi agama, sains, dan kebudayaan. Karena bersifat konseptual, hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa seluruh sivitas akademika telah menerima paradigma Makuta Ilmu, melainkan sebagai proposisi akademik yang memerlukan pengujian dan konsensus lebih lanjut.

Sumber primer penelitian terdiri atas Proposal Transformasi IAIN Menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7920 Tahun 2026 tentang Lambang Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Proposal transformasi digunakan untuk melacak rumusan paradigma keilmuan yang telah dikembangkan sebelumnya, khususnya paradigma antropokosmoteosentris, prinsip integrasi ilmu, serta motto *Humanity*, *Liberty*, dan *Spirituality* (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 17–19, 36–38). Adapun keputusan lambang digunakan untuk membaca struktur simbolik resmi universitas. Sumber sekunder utama adalah karya-karya paradigma keilmuan yang telah berkembang di lingkungan PTKIN, sebagaimana disebutkan dalam artikel ini. Dengan demikian, kajian bersifat *bounded literature review* yang memprioritaskan kedalaman pembacaan dan konsistensi sumber dibanding keluasan bibliografi tanpa batas.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling berhubungan, yaitu interpretasi, komparasi, dan sintesis. Tahap interpretasi membaca makna simbolik dan normatif Makuta, Al-Qur'an, masjid, pena, IPTEK, serta daun dalam keputusan lambang, kemudian menghubungkannya dengan kategori filsafat ilmu tanpa menganggap makna administratif identik dengan paradigma akademik (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026). Tahap komparasi membandingkan struktur Makuta Ilmu dengan model integrasi-interkoneksi, Gunung Ilmu, Twin Towers, Wahyu Memandu Ilmu, Wahdatul 'Ulum, Bahtera Ilmu, Harmonisasi Ilmu, dan Mutiara Keilmuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta ruang distingsi (Hidayah, Tobroni, & Faridi, 2023, pp. 306–309; Sakdiah et al., 2025, pp. 971–974). Tahap sintesis menyusun temuan menjadi tiga lapis filsafat ilmu—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—kemudian menurunkannya menjadi implikasi kurikulum, penelitian, pengabdian, dan budaya akademik (Nur, 2018, pp. 8–13; Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Model bertahap ini penting untuk mencegah proses “lokalisasi” berhenti pada estetika simbol atau, sebaliknya, integrasi kehilangan akar sosial-budaya yang hendak dijadikannya sumber pengetahuan.

Kriteria analitis yang digunakan untuk menilai kelayakan Makuta Ilmu terdiri atas koherensi filosofis, keterbukaan epistemik, relevansi kontekstual, dan daya operasional. Koherensi filosofis menuntut konsistensi antara pandangan tentang realitas, sumber pengetahuan, metode, dan tujuan ilmu, sebagaimana paradigma Gunung Ilmu menghubungkan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara terstruktur (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Keterbukaan epistemik menuntut agar paradigma tidak memonopoli kebenaran melalui satu disiplin, tetapi membuka dialog wahyu, rasio, empiris, intuisi, dan budaya dengan prosedur pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Kartanegara, 2005, pp. 47–53; Nur, 2018, pp. 10–12). Relevansi kontekstual mengukur sejauh mana paradigma berakar pada realitas Gorontalo tanpa terjebak romantisasi budaya, sedangkan daya

operasional menilai kemungkinan penerjemahan ke dalam kurikulum, riset, pengabdian, dan tata kelola akademik (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 311–318). Keempat kriteria ini menjadikan Makuta Ilmu bukan hanya konstruksi identitas, melainkan hipotesis institusional yang harus membuktikan kegunaannya dalam praktik akademik.

HASIL PENELITIAN

Jembatan Simbolik antara Identitas Lokal dan Horizon Keilmuan

Temuan pertama menunjukkan adanya korespondensi simbolik yang kuat antara bentuk lambang resmi UIN Sultan Amai Gorontalo dan gagasan ilmu sebagai mahkota peradaban. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam secara eksplisit menyebut bentuk utuh lambang sebagai Tudung Makuta Gorontalo dan menafsirkan makuta sebagai kehormatan, kearifan, dan kepemimpinan, sehingga simbol tersebut bukan tambahan dekoratif tetapi identitas utama yang menempatkan lokalitas Gorontalo pada pusat representasi universitas. Di dalam “makuta” itu, kitab atau Al-Qur’an diposisikan sebagai sumber utama nilai dan ilmu, masjid sebagai ruang ibadah, majelis ilmu, dan interaksi sosial-spiritual, sedangkan pena menandai tradisi belajar, literasi, pemikiran kritis, serta penyebaran ilmu (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4). Struktur simbolik ini beresonansi dengan paradigma Wahyu Memandu Ilmu yang menempatkan nilai wahyu sebagai arah pengembangan ilmu tanpa harus menghilangkan kerja ilmiah dan teknologi (Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022, pp. 234–240). Karena itu, secara semiotik makuta menyediakan “wadah” yang dapat memayungi relasi nilai, pengetahuan, spiritualitas, dan kepemimpinan, meskipun pengembangan menjadi paradigma tetap memerlukan argumentasi filosofis tersendiri.

Makna lambang juga menyatakan secara jelas kehadiran sains dan teknologi sebagai bagian dari identitas universitas Islam yang baru. Sirkuit elektronik, atom, dan sinyal diskret diartikan sebagai penguasaan serta pengembangan IPTEK, teknologi digital, sistem informasi, inovasi, pendidikan, riset, dan layanan akademik, sementara daun menunjukkan pertumbuhan, regenerasi intelektual, pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab manusia menjaga keseimbangan alam serta sosial (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 4). Konfigurasi ini penting karena menghadirkan sains-teknologi bukan sebagai unsur “asing” yang ditempelkan setelah perubahan menjadi UIN, tetapi sebagai komponen resmi identitas visual yang hidup berdampingan dengan Al-Qur’an, masjid, dan pena. Gagasan tersebut sejalan dengan kritik terhadap dikotomi ilmu di UIN Suska Riau yang menyatakan bahwa ilmu agama dan ilmu umum tidak seharusnya berdiri sendiri karena pemisahan keduanya dapat menimbulkan kehilangan spiritualitas pada sains dan kehilangan relevansi realitas pada studi agama (Helmiati et al., 2017, pp. 3–4). Bahri juga menegaskan bahwa kemajuan peradaban Islam mensyaratkan paradigma yang tidak diskriminatif terhadap disiplin berguna, termasuk ilmu kealaman dan teknologi (Bahri, 2012, pp. 38–40, 45–46). Dengan demikian, logo menyediakan bahasa simbolik awal bagi integrasi, sedangkan Makuta Ilmu memberi kemungkinan untuk menata bahasa simbolik itu menjadi kerangka konseptual akademik.

Temuan kedua adalah bahwa makuta dapat dipahami secara lebih produktif apabila ia tidak dipersempit menjadi “simbol kebesaran”, tetapi dibaca sebagai etika penempatan ilmu. Mahkota berada di bagian tertinggi tubuh bukan karena ia bebas dari kewajiban, melainkan karena ia menandai beban kehormatan dan kepemimpinan;

pembacaan ini sejalan dengan keputusan resmi yang menghubungkan makuta dengan kehormatan, kearifan, dan kepemimpinan (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 3). Thahir memakai metafora “mutiara” untuk menegaskan bahwa simbol lokal baru bernilai epistemologis ketika ia menjadi proses pemurnian makna dan kebijaksanaan, bukan sekadar penamaan estetis (Thahir, 2025, pp. 9–10, 31–33). Gunung Ilmu juga menunjukkan bahwa metafora budaya dapat berfungsi sebagai paradigma jika ia diterjemahkan ke dalam bangunan ilmu, core values, dan profil lulusan, sehingga relasinya dengan kurikulum dapat dibaca dan dievaluasi (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Dalam pengertian ini, “menjunjung ilmu” berarti memberikan posisi terhormat kepada pencarian kebenaran sekaligus membatasi kekuasaan ilmu dengan tanggung jawab etis, karena ilmu yang tinggi tanpa kebijaksanaan mudah berubah menjadi teknokrasi atau dominasi (al-Attas, 1995; Kuntowijoyo, 2006).

Makuta juga menawarkan keuntungan simbolik karena berbeda dari metafora bangunan yang cenderung menggambarkan hubungan antardisiplin secara spasial. Twin Towers menggambarkan dua rumpun yang berdiri dan terhubung, Gunung Ilmu menampilkan struktur lapis pengetahuan dalam simbol kosmologis Jawa, sedangkan Mutiara Keilmuan menekankan proses pembentukan nilai dan kebijaksanaan (Firdaus, Maulana, & Aris, 2022, pp. 122–126; Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 34–36; Thahir, 2025, pp. 31–33). Makuta, sebaliknya, dapat menekankan dimensi normatif: ilmu yang berada “di atas” harus memiliki keluhuran, kejernihan, dan tanggung jawab, bukan dominasi atas agama atau masyarakat. Pembacaan ini kompatibel dengan Kuntowijoyo yang menolak ilmu berhenti pada legitimasi normatif dan menekankan perlunya objektivikasi serta transformasi sosial, karena nilai Islam perlu hadir dalam bentuk pengetahuan yang dapat bekerja untuk kemanusiaan (Kuntowijoyo, 2006, pp. 54–60, 85–91). Ia juga dekat dengan al-Faruqi yang menempatkan kesatuan pengetahuan, kehidupan, dan manusia sebagai bagian dari proyek Islamisasi pengetahuan, walaupun Makuta Ilmu tidak harus mengikuti seluruh skema islamisasi tersebut (al-Faruqi, 1982, pp. 22–26). Karena itu, kekuatan Makuta terletak pada kemampuannya menggabungkan identitas lokal dengan etika ilmu, bukan pada klaim bahwa simbol itu sendiri otomatis menghasilkan teori ilmiah.

Ontologi: Kesatuan Realitas tanpa Penghapusan Perbedaan

Secara ontologis, Makuta Ilmu dirumuskan sebagai paradigma teo-antropo-kosmosentris, yakni realitas dipahami melalui hubungan Tuhan, manusia, dan alam tanpa melebur ketiganya menjadi satu entitas. Rumusan ini bersambung dengan paradigma antropokosmoteosentris yang telah diajukan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*, yang secara bahasa berarti berpusat pada manusia–alam–Tuhan dan menggunakan klasifikasi Kuntowijoyo tentang *ayat insaniyah*, *ayat kauniyah*, dan *ayat ilahiyah* (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 17–18). Prinsip tauhid menegaskan Tuhan sebagai dasar metafisis dan sumber ultimate makna, namun keberadaan manusia, masyarakat, budaya, dan alam memiliki realitas serta hukum yang dapat diteliti melalui metode yang sesuai dengan objeknya (al-Attas, 1995, pp. 1–7). Assegaf dan kolega menekankan perbedaan ontologis antara Khaliq dan makhluk dalam pandangan Islam, sehingga integrasi tidak boleh berarti menghapus batas antara yang transenden dan yang empiris (Assegaf et al., 2014, pp. 35–37). Dalam Bahtera Ilmu UIN Raden Intan, kesatuan asal ilmu pada Yang Satu justru menjadi dasar untuk menolak dikotomi, bukan alasan untuk

menyamakan seluruh objek dan metode penelitian (Nur, 2018, pp. 8–12). Dengan demikian, ontologi Makuta Ilmu menyatakan kesatuan horizon tetapi pluralitas level realitas: wahyu memberi orientasi metafisis, manusia menghadirkan dunia historis-sosial, dan alam memiliki keteraturan yang harus dibaca melalui pengamatan serta penalaran ilmiah.

Dimensi teosentris memperoleh representasi simbolik paling jelas melalui Al-Qur'an dan masjid dalam lambang resmi universitas. Al-Qur'an disebut sebagai sumber utama nilai dan ilmu sekaligus rujukan etika, hukum, sosial, dan spiritual, sedangkan masjid melambangkan pusat ibadah dan majelis ilmu, sehingga keduanya menegaskan bahwa kegiatan akademik tidak ditempatkan di luar horizon tanggung jawab keagamaan (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 3). Paradigma Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati menempuh arah serupa dengan menempatkan wahyu sebagai orientasi pengembangan ilmu dan kebijakan perguruan tinggi, tanpa menyatakan bahwa seluruh metode ilmiah diganti oleh tafsir teks (Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022, pp. 234–240). Wahdatul 'Ulum juga membangun kesatuan ontologis ilmu di atas tauhid sambil mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris pada level epistemologis (Sakdiah et al., 2025, pp. 971–974). Dalam Makuta Ilmu, dimensi teosentris karena itu berfungsi sebagai horizon makna dan etika yang mengarahkan pencarian ilmu, bukan mekanisme untuk mengakhiri penyelidikan dengan klaim sakral sebelum problem diteliti secara memadai.

Dimensi antroposentris menempatkan manusia bukan sebagai pusat absolut yang menggantikan Tuhan, tetapi sebagai subjek penafsir, peneliti, dan pelaku sejarah yang memiliki tanggung jawab atas produksi serta penggunaan pengetahuan. Ilmu sosial dan humaniora diperlukan karena agama selalu hadir melalui bahasa, lembaga, otoritas, praktik, konflik, dan negosiasi sosial; karena itu, studi Islam yang hanya normatif tidak cukup untuk memahami Islam yang menyejarah (Pettalangi & Dawing, 2022, pp. 1–2). Konsep *Buatulo Toulongo* memperkaya dimensi ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo memiliki struktur pembagian otoritas antara pemerintah, agama, dan adat yang dapat dibaca sebagai arena produksi legitimasi sosial (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 311–318). Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, kerangka tersebut membantu menjelaskan bahwa kebenaran sosial tidak hanya diperdebatkan dalam ruang kelas, tetapi juga dinegosiasikan oleh institusi dan aktor dengan modal serta otoritas berbeda (Bourdieu, 1977, pp. 17–19; Mannheim, 1936, pp. 2–5). Maka, antroposentrisme Makuta Ilmu adalah pengakuan terhadap manusia dan kebudayaan sebagai bagian dari realitas ilmiah, namun tetap dibatasi oleh etika tauhid dan keterbukaan terhadap koreksi.

Dimensi kosmosentris menempatkan alam sebagai realitas yang mempunyai keteraturan dan nilai intrinsik, bukan sekadar bahan eksploitasi ekonomi atau ilustrasi ayat. Unsur atom, sirkuit elektronik, sinyal diskret, dan daun dalam lambang resmi menunjukkan bahwa alam, teknologi, inovasi, dan keberlanjutan secara eksplisit termasuk dalam identitas UIN Sultan Amai Gorontalo (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 4). Gunung Ilmu juga mengintegrasikan keilmuan ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman sebagai satu bangunan kurikulum, sehingga studi kealaman bukan pelengkap melainkan salah satu pilar universitas (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Nasr mengingatkan bahwa sains yang terputus dari pandangan sakral terhadap alam dapat memperkuat dominasi teknologis tanpa kesadaran kosmologis, sementara paradigma Islam berupaya mengembalikan pengetahuan tentang alam pada kesadaran akan keteraturan dan tanggung jawab

manusia (Nasr, 1968, pp. 21–24; Assegaf et al., 2014, pp. 34–37). Karena itu, kosmosentrisme Makuta Ilmu menuntut riset sains dan teknologi yang kuat sekaligus orientasi ekologis yang mencegah kemajuan menjadi pembenaran bagi kerusakan alam.

Relasi teo-antropo-kosmosentris tidak bersifat hierarki mekanis, tetapi dialogis dan berlapis sesuai dengan jenis persoalan yang dikaji. Pada persoalan hukum, misalnya, wahyu memberi sumber normatif, akal melakukan penalaran, fakta sosial menyediakan konteks, dan adat dapat menjadi pengalaman kolektif yang perlu dianalisis; pada persoalan teknologi, data empiris serta rekayasa teknis dominan secara metodologis, tetapi pertanyaan etika dan kemaslahatan tetap memerlukan pertimbangan nilai (Kartanegara, 2005, pp. 47–53; Abdullah, 2006, pp. 219–223). Pola ini dekat dengan gagasan integrasi-interkoneksi yang menghindari isolasi disiplin, namun tidak menuntut semua disiplin memakai metode yang sama (Assegaf et al., 2014, pp. 4–5; Hidayah, Tobroni, & Faridi, 2023, pp. 306–309). Dalam falsafah Gorontalo, relasi adat, syariat, dan Al-Qur'an juga menunjukkan proses historis yang berkembang melalui negosiasi dan penataan ulang, bukan struktur beku sejak awal (Kau, 2019, pp. 20–22; Latif, Juarta, & Elviana, 2023, pp. 44–46). Ontologi Makuta Ilmu karena itu menolak dua simplifikasi sekaligus, sekularisme metodologis yang memutus ilmu dari nilai dan sakralisasi pengetahuan yang menutup kemungkinan koreksi ilmiah.

Epistemologi: Wahyu, Akal, Empiris, dan Budaya dalam Dialog Kritis

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur epistemologis Makuta Ilmu paling tepat dirumuskan sebagai integratif-dialogis, bukan hierarki tunggal atau peleburan sumber pengetahuan. Rumusan ini memperjelas prinsip integrasi ilmu yang telah dinyatakan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*, bahwa upaya mendefinisi ulang disiplin ilmu ditempuh dengan paradigma integrasi ilmu (*knowledge integration paradigm*) yang mengusung pandangan non-dikotomi sehingga sains dan wahyu bersifat dialogis dan integratif-interkoneksi (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 16–17). Sumber pengetahuan mencakup wahyu, akal, pengalaman empiris, dan kebudayaan, tetapi masing-masing bekerja dengan jenis otoritas serta prosedur pembenaran yang berbeda (Kartanegara, 2005). Wahyu memberikan orientasi normatif-transenden, akal melakukan konseptualisasi dan inferensi, pengalaman empiris menguji klaim tentang dunia faktual, sedangkan budaya menyimpan pengetahuan historis yang terbentuk melalui pengalaman kolektif dan institusi sosial (Abdullah, 2006, pp. 33–45; Geertz, 1973, pp. 89–93). Dalam kerangka ini, “integrasi” berarti membuka jalur komunikasi dan koreksi antar-sumber ketika suatu masalah memang memerlukan lebih dari satu disiplin, bukan menganggap semua jenis klaim memiliki standar bukti yang sama (Barbour, 1971, pp. 76–79). Rumusan ini menjaga keluwesan metodologis universitas sekaligus memastikan bahwa ilmu tidak terpisah dari horizon etik dan kebudayaan yang membentuknya.

Wahyu menempati posisi penting, tetapi fungsinya harus dibedakan antara sumber nilai, sumber pandangan dunia, dan objek interpretasi. Paradigma Wahyu Memandu Ilmu menunjukkan bahwa nilai wahyu dapat menjadi pedoman kebijakan keilmuan dan pembentukan kepribadian akademik, sementara proses ilmiah tetap membutuhkan perangkat disipliner untuk memahami realitas empiris (Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022, pp. 234–240). Al-Faruqi menekankan perlunya mengembalikan pengetahuan pada kesatuan tauhid, sedangkan al-Attas mengkritik sekularisasi ilmu

yang memisahkan pengetahuan dari adab dan tujuan metafisis manusia (al-Faruqi, 1982, pp. 22–26; al-Attas, 1995, pp. 13–16). Namun, Kuntowijoyo mengingatkan bahwa proyek keilmuan Islam tidak cukup berhenti pada pelabelan atau legitimasi; nilai normatif perlu diterjemahkan menjadi kategori objektif yang dapat diuji dan bekerja dalam realitas sosial (Kuntowijoyo, 2006, pp. 54–60). Makuta Ilmu disini mengambil posisi sintesis, wahyu memandu orientasi dan menyediakan horizon normatif, tetapi tafsir manusia terhadap wahyu tetap terbuka pada kritik metodologis, sejarah, bahasa, dan konteks.

Akal berfungsi sebagai perangkat kritik, abstraksi, argumentasi, dan pengujian koherensi yang menghubungkan berbagai jenis pengetahuan. Tradisi integrasi keilmuan pada dasarnya tidak mungkin berjalan tanpa rasionalitas, sebab perjumpaan antara teks, data, dan pengalaman menuntut kemampuan membedakan kategori, menyusun inferensi, serta mengevaluasi argumen (Kartanegara, 2005, pp. 47–53; Assegaf et al., 2014, pp. 37–40). Harmonisasi Ilmu UIN K.H. Abdurrahman Wahid mengartikulasikan hubungan ini melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani, yang menunjukkan adanya pluralitas cara mengetahui dengan penekanan berbeda pada teks, logika, dan pengalaman batin (Mazidah et al., 2026, pp. 97–99). Wahdatul ‘Ulum juga mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam satu horizon tauhid untuk menghindari pemisahan ilmu agama dan sains (Sakdiah et al., 2025, pp. 971–974). Pada Makuta Ilmu, akal tidak ditempatkan sebagai hakim absolut di atas wahyu dan pengalaman, tetapi sebagai medium refleksif yang memungkinkan berbagai sumber pengetahuan berkomunikasi secara argumentatif dan menghindari klaim otoritas yang tidak dapat diperiksa.

Pengalaman empiris penting karena UIN sebagai universitas tidak hanya memproduksi tafsir normatif, tetapi juga ilmu yang berhadapan dengan gejala alam, perilaku manusia, kebijakan, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Sains modern memperoleh kekuatannya dari observasi, pengukuran, eksperimen, dan koreksi publik, sehingga integrasi keilmuan akan kehilangan kredibilitas apabila data empiris hanya digunakan sebagai ornamen untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya (Barbour, 1971, pp. 76–79; Helmiati et al., 2017, pp. 3–4). Keputusan lambang UIN Sultan Amai yang memasukkan atom, sirkuit elektronik, dan sinyal diskret memberi sinyal institusional bahwa penguasaan teknologi digital serta inovasi merupakan bagian dari orientasi universitas, bukan wilayah sekunder di luar ilmu keislaman (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 4). Fridiyanto juga menunjukkan bahwa pendekatan transdisipliner menjadi relevan ketika universitas menghadapi perubahan disruptif dan persoalan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin (Fridiyanto, 2019, pp. 149–151). Karena itu, Makuta Ilmu menuntut kultur penelitian yang menghargai data, replikasi, transparansi, dan keterbukaan koreksi sekaligus mempertahankan refleksi etik atas penggunaan teknologi.

Budaya merupakan sumber pengetahuan yang paling membedakan Makuta Ilmu dari paradigma integrasi yang hanya bergerak pada hubungan “agama dan sains”. Pengetahuan lokal tidak harus diperlakukan sebagai kebenaran sakral yang kebal kritik, tetapi sebagai endapan pengalaman historis yang dapat menyimpan kategori moral, mekanisme penyelesaian konflik, tata hubungan sosial, dan cara membaca lingkungan yang relevan bagi penelitian (Geertz, 1973, pp. 89–93). *Buatulo Toulongo*, misalnya, dapat dikaji sebagai struktur pembagian otoritas dan modal sosial, sedangkan falsafah adat-syara’-Qur’ani dapat dibaca sebagai sejarah

negosiasi norma Islam dan adat di Gorontalo (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 311–318; Kau, 2019, pp. 20–22). Thahir menunjukkan kemungkinan serupa ketika Mutiara Keilmuan menjadikan konteks lokal Palu sebagai bagian dari distingsi paradigma, sementara Gunung Ilmu menafsirkan simbol Jawa untuk membangun kerangka kurikulum (Thahir, 2025, pp. 31–33). Sehingga dalam Makuta Ilmu, budaya karena itu berfungsi sebagai sumber pertanyaan, konsep, dan data yang harus diuji secara ilmiah, bukan sekadar dekorasi pada sampul dokumen akademik.

Relasi keempat sumber pengetahuan tersebut membutuhkan prinsip verifikasi lintas-domain agar integrasi tidak berubah menjadi pencampuran klaim. Klaim empiris tentang efektivitas suatu kebijakan harus diuji dengan data, klaim normatif harus dijelaskan sumber dan argumentasinya, klaim historis harus ditopang arsip atau bukti, sedangkan klaim budaya perlu dianalisis melalui konteks, praktik, dan perubahan makna (Abdullah, 2006, pp. 219–223; Kartanegara, 2005, pp. 47–53). Paradigma integrasi-interkoneksi sebenarnya bergerak ke arah ini dengan mendorong keterhubungan disiplin sambil mempertahankan kompetensi metodologis masing-masing bidang (Assegaf et al., 2014, pp. 4–5). Pengalaman Harmonisasi Ilmu juga memperlihatkan bahwa integrasi baru menjadi bermakna ketika dioperasionalkan dalam kurikulum dan RPS, bukan hanya dibicarakan pada tingkat visi (Mazidah et al., 2026, pp. 97–100; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 36–39). Maka dari itu, Makuta Ilmu perlu membangun “etik metodologis” yang sederhana tetapi tegas: setiap klaim harus dibuktikan dengan metode yang cocok dengan jenis klaimnya, dan setiap dialog antardisiplin harus dilakukan oleh atau bersama orang yang memiliki kompetensi disipliner yang memadai.

Aksiologi: Ilmu sebagai Kehormatan, Kemaslahatan, dan Tanggung Jawab

Secara aksiologis, Makuta Ilmu menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi karena ia membawa tanggung jawab peradaban, bukan karena ilmu memiliki kekuasaan tanpa batas. Orientasi ini sejalan dengan motto yang telah dirumuskan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*, yaitu *Humanity, Liberty, dan Spirituality*, yang menekankan penghormatan tertinggi pada kemanusiaan, kebebasan akademik, serta transendensi dan spiritualitas (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 18–19). Makuta resmi dimaknai sebagai kehormatan, kearifan, dan kepemimpinan, sedangkan pena di dalam lambang melambangkan penyebaran serta pengamalan ilmu untuk kemaslahatan umat dan menegaskan peran dosen, mahasiswa, serta peneliti sebagai pemikir kritis dan agen transformasi (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4). Rumusan ini memiliki kedekatan dengan Mutiara Keilmuan yang menempatkan pengetahuan sebagai sarana pencerahan dan pemuliaan manusia berlandaskan tauhid serta kemaslahatan (Thahir, 2025, pp. 19–21). Kuntowijoyo juga menempatkan ilmu dalam horizon transformasi sosial sehingga keislaman tidak berhenti pada kesalehan simbolik, tetapi hadir dalam upaya humanisasi, liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 2006, pp. 85–91). Karena itu, aksiologi Makuta Ilmu dapat dirumuskan melalui enam orientasi utama: kebenaran, kemaslahatan, kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan inovasi yang bertanggung jawab.

Orientasi kebenaran menuntut integritas akademik sebagai syarat pertama dari penghormatan terhadap ilmu. Menjunjung ilmu tidak masuk akal jika universitas mentoleransi plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi sitasi, jual beli karya akademik, atau penggunaan otoritas agama untuk membungkam kritik, sebab tindakan tersebut

merendahkan ilmu menjadi alat status (Kuhn, 1970, pp. 43–51; Laudan, 1977, pp. 78–80). Al-Attas menghubungkan ilmu dengan adab, yakni kemampuan menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat, sehingga kerusakan pengetahuan pada akhirnya juga merupakan kerusakan etis dalam cara manusia memahami posisi dirinya dan objek ilmu (al-Attas, 1995, pp. 13–16). Dalam perspektif kelembagaan, paradigma yang sehat harus membentuk budaya akademik yang memungkinkan kritik, verifikasi, dan koreksi terbuka, bukan sekadar memastikan kepatuhan terhadap terminologi resmi (Firdaus, Maulana, & Aris, 2022, pp. 122–126; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 36–39). Sehingga, implementasi Makuta Ilmu harus dimulai dari tata kelola akademik yang jujur, transparan, dan berbasis merit sebelum diterjemahkan menjadi mata kuliah atau slogan institusional.

Orientasi kemanusiaan dan keadilan menuntut ilmu memberi perhatian pada kelompok serta persoalan yang sering tidak terlihat oleh logika pembangunan yang semata teknokratis. Harmonisasi Ilmu UIN K.H. Abdurrahman Wahid menempatkan humanisme dan moderasi sebagai poros yang harus diwujudkan dalam kurikulum, pedagogi, serta kultur riset, sehingga integrasi bukan hanya hubungan konseptual antara sains dan agama tetapi juga pembentukan lulusan yang peka secara sosial (Aryaningtyas et al., 2025, pp. 34–39; Mazidah et al., 2026, pp. 94–99; Syufiyah et al., 2026, pp. 196–199). Gunung Ilmu juga menghubungkan integrasi ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman dengan nilai moderasi, inteligensi, dan transformasi yang berorientasi pada karakter humanistik dan akademik (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8). Dalam konteks Gorontalo, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam riset mengenai kemiskinan, layanan publik, ketimpangan, hukum adat, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, konflik sosial, serta akses teknologi tanpa kehilangan landasan etik Islam (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 318–323; Kuntowijoyo, 2006, pp. 85–91). Ilmu menjadi “mahkota” justru ketika ia mengangkat martabat manusia, bukan ketika ia hanya meningkatkan reputasi institusi.

Orientasi keberlanjutan memperoleh dasar simbolik yang tegas dari elemen daun pada lambang UIN Sultan Amai Gorontalo. Dokumen resmi menafsirkan daun sebagai pertumbuhan, regenerasi intelektual, pembaruan ilmu, pembangunan berkelanjutan, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam serta sosial (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 4). Makna ini memperluas integrasi keilmuan dari perdebatan klasik “agama versus sains” menuju persoalan ekologis yang menuntut kerja bersama teologi, etika, ilmu lingkungan, ekonomi, hukum, teknologi, dan kebijakan publik (Nasr, 1968, pp. 21–24; Thahir, 2025, pp. 13–19). Fridiyanto mengingatkan bahwa saintisme yang reduksionis dapat menghasilkan teknologi yang merusak tatanan alam dan kemanusiaan apabila tidak dikoreksi oleh horizon holistik serta transdisipliner (Fridiyanto, 2019, pp. 149–151). Karena itu, keberlanjutan harus menjadi salah satu indikator konkret Makuta Ilmu dalam riset, pengelolaan kampus, dan pengabdian masyarakat, bukan sekadar simbol hijau dalam identitas visual.

Orientasi inovasi menolak anggapan bahwa integrasi agama dan ilmu identik dengan sikap defensif terhadap modernitas. Unsur sirkuit elektronik, atom, dan sinyal diskret pada lambang justru menyatakan komitmen resmi UIN Sultan Amai Gorontalo terhadap teknologi digital, sistem informasi, inovasi, pendidikan, riset, dan layanan akademik (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, p. 4). Wahdatul ‘Ulum dengan pendekatan transdisipliner juga dibangun untuk merespons era disrupsi dan mendorong pengetahuan bekerja pada problem nyata melalui rekayasa keilmuan

serta teknologi (Fridiyanto, 2019, pp. 149–151). Akan tetapi, inovasi dalam Makuta Ilmu harus selalu disertai pertanyaan aksiologis: teknologi untuk siapa, siapa yang memperoleh manfaat, risiko apa yang ditimbulkan, nilai apa yang mungkin hilang, dan bagaimana akuntabilitasnya dijamin (Barbour, 1971, pp. 76–79). Dengan cara itu, UIN tidak menjadi penonton perkembangan sains tetapi juga tidak menjadi pemuja teknologi; ia membangun inovasi yang kritis, etis, dan berorientasi kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Etos Akademik: Menjunjung Ilmu sebagai Mahkota Peradaban

Pembahasan ini berangkat dari pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “menjunjung ilmu sebagai mahkota peradaban” dan mengapa frasa itu penting bagi pengembangan keilmuan UIN Sultan Amai Gorontalo. Frasa tersebut bukan sekadar slogan kehormatan akademik, melainkan pernyataan filosofis yang menyatukan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, ia menegaskan kesatuan relasional Tuhan, manusia, dan alam; secara epistemologis, ia membuka dialog wahyu, akal, empiris, dan budaya; secara aksiologis, ia mengarahkan ilmu pada kebenaran, kemaslahatan, kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan inovasi yang bertanggung jawab.

Kata “menjunjung” mengandung makna ganda, mengangkat tinggi sekaligus memikul. Ilmu tidak hanya dihormati, tetapi juga dipikul sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Dalam tradisi Gorontalo, *makuta* adalah simbol kehormatan, kearifan, dan kepemimpinan (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4). Namun, mahkota selalu mengandung paradoks, ia berada di tempat tertinggi, tetapi justru karena itu ia harus menjaga seluruh tubuh. Maka, “ilmu sebagai mahkota peradaban” berarti ilmu adalah puncak kehormatan peradaban, tetapi sekaligus beban tertinggi untuk memastikan peradaban tetap manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Ilmu menjadi mahkota ketika ia menuntun dan mencerahkan, ia menjadi mahkota palsu ketika dipakai untuk menindas, mengeksploitasi, atau membodohi.

Dalam kerangka Makuta Ilmu, makna filosofis ini bersambung dengan paradigma antropokosmoteosentris yang telah dirumuskan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Dokumen tersebut menegaskan bahwa sains dan wahyu tidak ditempatkan pada garis kontradiktif, melainkan dialogis, integratif-interkoneksi (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 16–19). Motto *Humanity, Liberty, dan Spirituality* juga memperkuat orientasi etis ini: ilmu harus memuliakan kemanusiaan, menghargai kebebasan akademik, dan berpijak pada transendensi serta spiritualitas (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 18–19). Dengan demikian, “menjunjung ilmu” berarti menolak ilmu yang bebas nilai sekaligus menolak ilmu yang menjadi alat dominasi. Dalam konteks lokal Gorontalo, falsafah “*Adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kuru’ani*” dan struktur *Buatulo Toulongo* memberikan dasar bahwa ilmu yang menjadi mahkota peradaban adalah ilmu yang memimpin dengan kearifan, bukan menguasai dengan kekuasaan; ilmu yang menyatukan, bukan memecah belah. Ilmu menjadi mahkota ketika ia memuliakan kehidupan, ia bukan mahkota ketika ia merendahkan martabat manusia atau merusak alam.

Oleh karena itu, makna filosofis “menjunjung ilmu sebagai mahkota peradaban” dapat dirumuskan sebagai etos akademik yang mengikat iman dengan pencarian kebenaran, tradisi dengan kritik, lokalitas dengan dialog universal, teknologi dengan

etika, serta kecemerlangan akademik dengan kemaslahatan masyarakat. Etos inilah yang seharusnya menjadi jembatan antara rumusan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Makuta Ilmu dengan agenda konkret universitas, distingsi keilmuan, kurikulum, riset, pengabdian, dan tata kelola akademik.

Distingsi Makuta Ilmu di antara Paradigma Keilmuan PTKIN

Jika ditempatkan di antara paradigma keilmuan PTKIN, Makuta Ilmu memiliki kesamaan keluarga dengan model-model integratif lain, tetapi tidak perlu dipaksakan menjadi “lebih unggul” dari paradigma yang sudah berkembang. Ia justru dapat dibaca sebagai kelanjutan dari paradigma *antropokosmoteosentris* yang telah dirumuskan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*, yang menawarkan integrasi ilmu, non-dikotomi sains dan wahyu, serta falsafah Gorontalo *Adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kuru’ani* (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2024, hlm. 17–19, 36–38). Integrasi-interkoneksi UIN Sunan Kalijaga menekankan keterhubungan disiplin dan kritik terhadap isolasi keilmuan, Wahyu Memandu Ilmu menegaskan fungsi wahyu sebagai orientasi pengembangan sains, sedangkan Twin Towers UIN Sunan Ampel memvisualisasikan penguatan ilmu keislaman dan ilmu umum yang kemudian dipertemukan dalam proses integrasi (Abdullah, 2006, pp. 219–223; Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022, pp. 234–240; Firdaus, Maulana, & Aris, 2022, pp. 122–126). Wahdatul ‘Ulum menegaskan kesatuan ontologis ilmu berbasis tauhid dan mendorong pendekatan transdisipliner, sementara Harmonisasi Ilmu menonjolkan keselarasan agama-sains yang diterjemahkan ke dalam keunggulan, humanisme, dan moderasi (Sakdiah et al., 2025, pp. 971–978; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 34–39). Spektrum tersebut, Makuta Ilmu dapat mengambil posisi sebagai paradigma integratif yang menambahkan perhatian kuat pada kebudayaan sebagai sumber pertanyaan dan kategori keilmuan, sekaligus memakai simbol lokal resmi universitas sebagai pintu masuk konseptual. Distingsi ini bukan klaim eksklusivitas, tetapi upaya menempatkan konteks Gorontalo sebagai bagian aktif dari produksi ilmu.

Perbandingan dengan Gunungan Ilmu dan Mutiara Keilmuan paling membantu untuk memahami bagaimana simbol lokal dapat dinaikkan menjadi arsitektur akademik. Gunungan Ilmu tidak berhenti pada bentuk wayang, tetapi menerjemahkan simbol menjadi asumsi dasar, objek kajian, metode, analisis, nilai, hasil, representasi, core values, dan profil lulusan, sehingga budaya memperoleh fungsi epistemologis yang operasional (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8, 34–36). Mutiara Keilmuan juga menjelaskan bahwa metafora “mutiara” berhubungan dengan proses pemurnian, makna, kebijaksanaan, dan konteks lokal Palu, lalu mengaitkannya dengan dialog wahyu, akal, realitas sosial, serta tanggung jawab moral (Thahir, 2025, pp. 9–10, 31–33). Pelajaran bagi Makuta Ilmu ialah bahwa kekuatan simbol harus dibuktikan melalui konsistensi struktur dan produktivitas akademik, bukan melalui pengulangan narasi identitas. Apabila makuta hanya hadir di logo, pidato, dan ornamen visual, ia belum menjadi paradigma; sebaliknya, jika prinsip kehormatan ilmu, integrasi sumber pengetahuan, tanggung jawab kemanusiaan, inovasi, dan keberlanjutan membentuk keputusan kurikulum serta riset, barulah simbol memperoleh daya epistemologis. Dengan demikian, distingsi Makuta Ilmu harus terletak pada cara ia bekerja, bukan sekadar pada nama yang berbeda.

Makuta Ilmu juga dapat belajar dari Bahtera Ilmu Integratif-Prismatik UIN Raden Intan Lampung mengenai pentingnya menghubungkan budaya lokal dengan struktur filsafat ilmu secara hati-hati. Nur menunjukkan bahwa model tersebut bertolak

dari keyakinan bahwa ilmu berasal dari Dzat Yang Satu, lalu menolak dikotomi epistemologis dan mengarahkan aksiologi pada pembentukan manusia yang intelektual, spiritual, serta berintegritas, sambil memanfaatkan simbol budaya Lampung untuk membentuk bangunan keilmuan (Nur, 2018, pp. 1–3, 8–12). Pola ini relevan bagi Gorontalo karena makuta dapat menjadi metafora yang menjembatani tauhid, ilmu, kepemimpinan, dan etika tanpa menjadikan budaya lokal sebagai tandingan terhadap Islam. Falsafah *Adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kuru'ani* justru menyediakan mekanisme internal yang menempatkan adat dalam dialog dengan syariat dan Al-Qur'an, sehingga kebudayaan dipahami sebagai ruang interpretasi yang terus bergerak (Kau, 2019, pp. 20–22; Latif, Juarta, & Elviana, 2023, pp. 44–46). Pendekatan semacam ini lebih produktif daripada romantisme budaya karena membuka ruang bagi kritik terhadap unsur lokal yang tidak lagi adil atau relevan, sekaligus menjaga pengetahuan lokal yang terbukti berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

Dari sisi filsafat ilmu, kontribusi paling penting Makuta Ilmu adalah upaya memindahkan diskursus integrasi dari oposisi biner “agama versus sains” menuju konfigurasi yang lebih luas: Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan. Dikotomi agama-sains memang merupakan masalah historis yang kuat dalam pendidikan Islam modern, tetapi realitas universitas kontemporer menuntut perhatian pada teknologi digital, ekonomi, hukum, lingkungan, budaya, politik, dan etika yang tidak dapat disederhanakan menjadi dua blok pengetahuan (Bahri, 2012, pp. 38–40; Helmiati et al., 2017, pp. 3–4). Mutiara Keilmuan telah bergerak ke arah ini dengan menekankan interaksi wahyu, akal, realitas sosial, dan tanggung jawab moral, sedangkan Wahdatul 'Ulum menambah kerangka transdisipliner untuk problem masyarakat (Thahir, 2025, pp. 5–10; Fridiyanto, 2019, pp. 149–151). Makuta Ilmu meneruskan gerak tersebut dengan memberi kedudukan eksplisit kepada budaya lokal sebagai salah satu locus pengetahuan sekaligus menghubungkannya dengan IPTEK dan keberlanjutan yang sudah tertulis dalam makna lambang resmi universitas (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4). Karena itu, integrasi yang ditawarkan bukan “menempelkan ayat pada sains”, melainkan membangun ekologi pengetahuan yang saling mengoreksi dan bekerja pada problem konkret.

Dari Paradigma ke Kurikulum, Riset, dan Pengabdian

Implikasi pertama Makuta Ilmu terletak pada desain kurikulum yang harus menerjemahkan paradigma tanpa menyeragamkan disiplin. Pengalaman Gunung Ilmu menunjukkan bahwa paradigma menjadi produktif ketika body of knowledge dan core values dikaitkan dengan profil lulusan serta struktur kurikulum, sedangkan Harmonisasi Ilmu UIN K.H. Abdurrahman Wahid telah mencoba memasukkan integrasi ke dalam CPL, RPS, dan mata kuliah yang mempertemukan sains dengan agama (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8; Mazidah et al., 2026, pp. 97–100). Bagi UIN Sultan Amai, boleh jadi prinsip ini dapat diterjemahkan melalui capaian yang bersifat universitas, misalnya kemampuan berpikir integratif, etika akademik, literasi digital, kepedulian ekologis, pemahaman budaya Gorontalo, dan kemampuan bekerja lintas disiplin, tanpa mewajibkan semua program studi memiliki isi yang sama. Program studi keislaman tetap menjaga kedalaman kompetensi turats, tafsir, fikih, teologi, atau sejarah, sedangkan program sains dan profesional tetap menjaga standar metodologis bidangnya; integrasi terjadi melalui problem, nilai, dan kolaborasi yang relevan (Abdullah, 2006, pp. 219–223; Kartanegara, 2005, pp. 47–53). Dengan

demikian, kurikulum Makuta Ilmu seharusnya memperluas kualitas disiplin, bukan mengaburkan batas kompetensi.

Pada level pembelajaran, Makuta Ilmu menuntut pergeseran dari transfer pengetahuan menuju pembentukan kemampuan menalar, menguji, berdialog, dan bertindak etis. Integrasi-interkoneksi telah lama menekankan perlunya proses pembelajaran yang tidak mengisolasi materi agama dari realitas sosial dan sains, sedangkan Mutiara Keilmuan menekankan dialog epistemologis yang saling memperkaya untuk memecahkan persoalan kompleks (Assegaf et al., 2014, pp. 4–5; Thahir, 2025, pp. 9–10). Model pembelajaran berbasis kasus, proyek, riset, dan problem lokal dapat menjadi ruang konkret untuk mempertemukan wahyu, teori, data, serta kebudayaan, misalnya ketika mahasiswa meneliti pengelolaan lingkungan, ekonomi masyarakat, resolusi konflik, pelayanan publik, atau digitalisasi pengetahuan lokal Gorontalo (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 318–323; Fridiyanto, 2019, pp. 149–151). Unsur pena dalam lambang resmi juga memberi dasar simbolik bagi penguatan literasi, penulisan ilmiah, pemikiran kritis, dan tanggung jawab penyebarluasan ilmu, sehingga kualitas akademik harus diukur dari kemampuan mahasiswa menghasilkan argumen serta karya yang dapat diperiksa publik (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4). Model ini, “mahkota” bukan hadiah kelulusan, tetapi disiplin intelektual yang dibentuk melalui proses belajar.

Pada bidang penelitian, Makuta Ilmu dapat berfungsi sebagai payung untuk membangun klaster persoalan tanpa mengubah paradigma menjadi tema riset yang memaksa. Klaster pertama dapat berkaitan dengan Islam, adat, dan perubahan sosial; klaster kedua dengan tata kelola, hukum, ekonomi, dan kemaslahatan; klaster ketiga dengan sains, teknologi, serta transformasi digital; dan klaster keempat dengan lingkungan, keberlanjutan, serta ketahanan masyarakat (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4; Kango & Tungkagi, 2026, pp. 311–323). Wahdatul ‘Ulum memperlihatkan pentingnya penelitian interdisipliner dan transdisipliner untuk menjembatani filsafat yang abstrak dengan penyelesaian problem nyata, sementara Harmonisasi Ilmu menempatkan kultur riset sebagai salah satu locus implementasi paradigma (Sakdiah et al., 2025, pp. 975–978; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 36–39). Akan tetapi, proyek lintas disiplin harus tetap tunduk pada standar metodologis, kompetensi peneliti, dan etika penelitian agar integrasi tidak menjadi alasan untuk menghasilkan klaim yang longgar atau tidak terverifikasi (Laudan, 1977, pp. 78–80; Barbour, 1971, pp. 76–79). Keberhasilan Makuta Ilmu di bidang riset karena itu dapat diukur dari mutu publikasi, relevansi persoalan, kualitas kolaborasi, penggunaan data, dan dampak sosial, bukan dari jumlah judul penelitian yang memasukkan kata “makuta”.

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, struktur sosial Gorontalo memberi peluang bagi universitas untuk menjadikan ilmu sebagai mediator di antara aktor negara, agama, adat, masyarakat sipil, dan generasi muda. *Buatulo Toulongo* telah dianalisis sebagai mekanisme yang mempertemukan otoritas pemerintah, agama, dan adat serta memiliki potensi sebagai modal sosial untuk moderasi dan ketahanan komunitas (Kango & Tungkagi, 2026, pp. 311–318; Kau, 2019, pp. 20–22). Paradigma Makuta Ilmu dapat mengembangkan model pengabdian yang tidak datang membawa paket solusi dari kampus, tetapi menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman lokal melalui riset partisipatif, pendidikan masyarakat, pendampingan hukum, literasi digital, inovasi ekonomi, dan konservasi lingkungan (Kuntowijoyo, 2006, pp. 85–91). Pendekatan tersebut sejalan dengan aksiologi ilmu

yang menuntut kemaslahatan dan pemberdayaan, sekaligus menghindari posisi kampus sebagai satu-satunya pemilik pengetahuan (al-Faruqi, 1982, pp. 22–26). Dengan demikian, pengabdian menjadi laboratorium sosial untuk menguji apakah integrasi yang dibicarakan di ruang akademik benar-benar mampu bekerja bersama masyarakat.

Syarat Kritis agar Makuta Ilmu Tidak Menjadi Jargon

Tantangan pertama adalah bahaya formalisme, yaitu situasi ketika paradigma hanya hadir dalam dokumen strategis, sambutan pimpinan, poster, atau mata kuliah institusional tanpa mengubah praktik akademik. Assegaf dan kolega mengingatkan bahwa integrasi-interkoneksi tidak boleh menjadi “jargon” yang terlepas dari produksi pengetahuan, publikasi, dan dinamika akademik, sedangkan pengalaman UIN lain menunjukkan pentingnya menurunkan paradigma ke kurikulum serta penelitian (Assegaf et al., 2014, pp. 4–5). Firdaus, Maulana, dan Aris juga menunjukkan bahwa paradigma yang diperlakukan sebagai perangkat disiplin dapat membatasi kreativitas jika aturan lebih dominan daripada problem ilmiah yang hendak diselesaikan (Firdaus, Maulana, & Aris, 2022, pp. 122–126). Karena itu, Makuta Ilmu harus memiliki ruang evaluasi berkala, forum kritik, indikator implementasi, dan kemungkinan revisi berdasarkan pengalaman fakultas serta perkembangan pengetahuan. Paradigma yang hidup bukan yang paling sering diulang, tetapi yang paling produktif menghasilkan pertanyaan baru dan memperbaiki praktik akademik.

Tantangan kedua adalah romantisasi lokalitas yang dapat mengubah budaya Gorontalo menjadi entitas tunggal, murni, dan tidak berubah. Sejarah falsafah adat-syara'-Qur'ani justru memperlihatkan perubahan formulasi, negosiasi, dan reinterpretasi, sehingga tradisi tidak pernah sepenuhnya beku (Kau, 2019, pp. 20–22). Thahir juga menunjukkan bahwa penggunaan kearifan lokal sebagai basis paradigma harus ditempatkan dalam dialog dengan nilai nasional, universal, serta tantangan kontemporer, bukan dijadikan pembatas terhadap ilmu yang datang dari luar (Thahir, 2025, pp. 5, 31–33). Dalam Makuta Ilmu, budaya perlu diperlakukan sebagai sumber pengetahuan yang terbuka untuk kritik terhadap relasi kuasa, ketimpangan gender, eksklususi, atau praktik yang tidak lagi sejalan dengan keadilan dan kemaslahatan. Sikap kritis ini justru menjaga martabat tradisi, karena budaya diperlakukan sebagai warisan intelektual yang hidup dan mampu berdialog, bukan benda museum yang harus dibekukan.

Tantangan ketiga adalah ketegangan antara universalisme sains dan partikularitas nilai lokal-keagamaan. Sains membutuhkan standar pembuktian yang dapat diperiksa lintas budaya, sementara paradigma Islam dan kearifan lokal membawa pertanyaan normatif tentang makna, tujuan, serta akibat sosial yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh metode empiris semata (Barbour, 1971, pp. 76–79). Makuta Ilmu tidak perlu menyelesaikan ketegangan itu dengan memenangkan salah satu pihak, tetapi dengan menetapkan pembagian kerja epistemik yang jelas, fakta diuji sebagai fakta, nilai diperdebatkan sebagai nilai, interpretasi teks dipertanggungjawabkan melalui metodologi, dan kebijakan dinilai melalui data sekaligus pertimbangan etis (Abdullah, 2006, pp. 219–223; Nur, 2018, pp. 10–12). Paradigma Wahyu Memandu Ilmu dan Wahdatul 'Ulum menunjukkan bahwa orientasi tauhid dapat berdampingan dengan pengembangan pengetahuan modern jika hubungan sumber pengetahuan dirumuskan secara metodologis, bukan retorik (Ridwan, Natsir, & Haryanti, 2022, pp. 234–240; Sakdiah et al., 2025, pp. 971–978).

Prinsip ini memungkinkan UIN Sultan Amai menjadi universitas Islam yang religius tanpa kehilangan kredibilitas ilmiah dan modern tanpa kehilangan orientasi etik.

Tantangan keempat menyangkut institusionalisasi, sebab paradigma membutuhkan kepemimpinan, kebijakan, sumber daya, dan komunitas akademik yang menerjemahkannya secara konsisten. Keputusan lambang telah memberikan legitimasi formal bagi Makuta sebagai identitas visual universitas, tetapi legitimasi epistemologis hanya dapat muncul melalui proses akademik yang melibatkan dosen, mahasiswa, fakultas, senat, pusat studi, dan mitra masyarakat (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 1–4; Kuhn, 1970, pp. 43–51). Pengalaman Wahdatul ‘Ulum yang berkembang melalui diskusi panjang menunjukkan bahwa proses deliberatif merupakan bagian penting dari pembentukan paradigma, sementara Harmonisasi Ilmu memperlihatkan perlunya hubungan antara filosofi, kurikulum, pedagogi, dan penelitian (Fridiyanto, 2019, pp. 149–150; Aryaningtyas et al., 2025, pp. 36–39). Oleh sebab itu, tahap berikutnya bagi Makuta Ilmu seharusnya berupa penyusunan naskah akademik, forum lintas fakultas, uji konsep pada beberapa program studi, pemetaan riset, dan evaluasi periodik sebelum paradigma diperlakukan sebagai sistem yang mapan (Suharto, Abas, & Faishol, 2017, pp. 7–8; Assegaf et al., 2014, pp. 4–5). Keterbukaan proses justru akan memperkuat kepemilikan bersama dan mencegah paradigma menjadi proyek personal atau administratif semata.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa ungkapan “menjunjung ilmu sebagai mahkota peradaban” mempunyai makna lebih dalam daripada slogan kehormatan akademik. Ilmu dijunjung ketika universitas memelihara keberanian bertanya, disiplin metodologis, adab, kejujuran, keterbukaan kritik, kepedulian pada manusia, serta tanggung jawab terhadap alam dan masa depan (al-Attas, 1995, pp. 13–16; Kuntowijoyo, 2006, pp. 85–91). Makuta sebagai simbol lokal memberi bahasa yang mudah dikenali untuk mengungkapkan nilai tersebut, sedangkan Al-Qur’an, masjid, pena, teknologi, dan daun dalam lambang resmi menyediakan konfigurasi visual yang mendukung pembacaan integratif terhadap agama, ilmu, inovasi, dan keberlanjutan (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2026, pp. 3–4; Thahir, 2025, pp. 5–10). Meski demikian, martabat paradigma tidak ditentukan oleh keindahan simbol, tetapi oleh kapasitasnya menghasilkan tradisi penelitian, kurikulum, dan pengabdian yang terus berkembang serta mampu menyelesaikan persoalan nyata (Laudan, 1977, pp. 78–80; Sakdiah et al., 2025, pp. 975–978). Pada titik ini, Makuta Ilmu lebih tepat dipahami sebagai horizon bersama yang mengarahkan kerja akademik daripada formula tertutup yang mengatur setiap disiplin secara seragam.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa Makuta Ilmu dapat dirumuskan sebagai paradigma keilmuan yang memperoleh relevansi kuat dari konteks historis-budaya Gorontalo dan resonansi baru dari lambang resmi UIN Sultan Amai Gorontalo, tetapi status simbolik dan status epistemologis keduanya harus tetap dibedakan. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7920 Tahun 2026 secara resmi menetapkan Tudung Makuta Gorontalo sebagai bentuk utama lambang dan mengartikulasikan makuta sebagai kehormatan, kearifan, serta kepemimpinan, disertai unsur Al-Qur’an, masjid, pena, IPTEK, dan daun yang merepresentasikan agama, ilmu, literasi, teknologi, inovasi, serta keberlanjutan. Fakta institusional ini menyediakan dasar simbolik yang sangat kuat, tetapi tidak dengan sendirinya

menetapkan Makuta Ilmu sebagai paradigma akademik; legitimasi paradigmatis harus dibangun melalui argumentasi, penerimaan komunitas ilmiah, praktik akademik, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan perbedaan tersebut, Makuta dapat menjadi sumber inspirasi konseptual tanpa membuat artikel melakukan klaim yang melampaui isi keputusan resmi.

Secara ontologis, Makuta Ilmu menempatkan Tuhan, manusia, dan alam dalam kesatuan relasional yang tetap mempertahankan perbedaan level realitas, sehingga tauhid berfungsi sebagai horizon metafisis dan etik tanpa meniadakan otonomi metodologis kajian empiris serta sosial. Secara epistemologis, paradigma ini menghubungkan wahyu, akal, pengalaman empiris, dan budaya dalam dialog kritis yang mengakui perbedaan prosedur pembenaran masing-masing sumber pengetahuan, sejalan dengan semangat integrasi-interkoneksi, Wahyu Memandu Ilmu, dan Wahdatul 'Ulum. Secara aksiologis, ilmu diarahkan pada kebenaran, kemaslahatan, kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan inovasi yang bertanggung jawab, sehingga martabat ilmu diukur dari integritas serta kontribusinya terhadap peradaban, bukan dari prestise simbolik semata. Tiga lapis ini menempatkan Makuta Ilmu sebagai sintesis yang berakar lokal tetapi tidak anti-universal.

Konsekuensi praktisnya adalah bahwa Makuta Ilmu perlu diterjemahkan ke dalam capaian pembelajaran universitas, desain kurikulum, kultur penelitian, pengabdian, dan tata kelola akademik tanpa menyeragamkan metode tiap disiplin. Pengalaman Gunung Ilmu, Mutiara Keilmuan, Harmonisasi Ilmu, dan Wahdatul 'Ulum menunjukkan bahwa paradigma baru bermakna jika mampu membentuk hubungan antara filsafat, kurikulum, riset, profil lulusan, serta problem masyarakat. UIN Sultan Amai Gorontalo karena itu memerlukan proses lanjutan berupa naskah akademik, forum lintas disiplin, uji implementasi, indikator evaluasi, dan ruang kritik yang memungkinkan rumusan paradigma disempurnakan berdasarkan pengalaman nyata. Proses tersebut sejalan dengan makna "mahkota" sebagai kehormatan yang selalu disertai tanggung jawab: semakin tinggi ilmu ditempatkan, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara ilmiah dan sosial.

Pada akhirnya, "menjunjung ilmu sebagai mahkota peradaban" dapat menjadi prinsip yang khas sekaligus inklusif bagi UIN Sultan Amai Gorontalo apabila ia dipahami sebagai etos akademik, bukan sekadar formula branding. Etos itu mengikat iman dengan pencarian kebenaran, tradisi dengan kritik, lokalitas dengan dialog universal, teknologi dengan etika, serta kecemerlangan akademik dengan kemaslahatan masyarakat. Makuta Ilmu menawarkan bahasa budaya untuk menegaskan bahwa pengetahuan harus ditempatkan pada posisi terhormat, tetapi kehormatan tersebut hanya sah apabila ilmu terus terbuka terhadap koreksi dan diarahkan pada pemuliaan manusia serta pemeliharaan kehidupan. Karena itu, kekuatan paradigma ini terletak bukan pada klaim finalitasnya, melainkan pada kemampuannya mengandung komunitas akademik UIN Sultan Amai Gorontalo untuk mengembangkan tradisi berpikir yang integratif, kritis, berakar, dan transformatif. Dalam kerangka ini, Makuta Ilmu sekaligus merupakan kelanjutan dan pendalaman atas paradigma antropokosmoteosentris yang telah dirumuskan dalam *Proposal Transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Aryaningtyas, U., Maisaroh, I., Fitriani, R., & Hufron, M. (2025). The configuration of the scientific paradigm at UIN K.H. Abdurrahman Wahid in distingsi and synergy of the concept of excellence, humanism, and moderation. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.62446/averroes.020103>
- Assegaf, A. R., Karwadi, Sirait, S., Arif, M., Luthfi, M. J., Fatonah, S., Marzuki, Maksudin, Usman, Mustaqim, A., & Muqowim. (2014). *Pengarusutamaan paradigma integrasi-interkoneksi dalam kurikulum dan keilmuan Prodi PGMI-PGRA Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (M. Arif, Ed.). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Bahri, S. (2012). Perubahan paradigma keilmuan IAIN menuju UIN Ar-Raniry. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(2), 38-52. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i2.54>
- Barbour, I. G. (1971). *Issues in science and religion*. Harper & Row.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice* (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2026). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7920 Tahun 2026 tentang Lambang Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Firdaus, M. F., Maulana, M. A. K., & Aris, M. (2022). Paradigma keilmuan Twin Towers UIN Sunan Ampel Surabaya perspektif Michel Foucault. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1(1), 122–146. <https://doi.org/10.15642/jitp.2022.1.1.122-146>
- Fridiyanto. (2019). Paradigma Wahdatul ‘Ulum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Sebuah upaya filosofis menghadapi era disrupsi. *Analytica Islamica*, 21(2), 149–155. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v8i2.7078>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Helmiati, Hanafi, I., Hassan, A., Simaremare, H., & Hadi, A. (Eds.). (2017). *Spiral Andromeda: Paradigma integrasi keilmuan UIN Suska Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hidayah, U., Tobroni, & Faridi. (2023). Islamisasi integrasi interkoneksi ilmu pengetahuan dan agama: Model keilmuan di perguruan tinggi Islam. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 5(2), 306–320. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v5i2.897>
- IAIN Sultan Amai Gorontalo. (2024). *Proposal transformasi IAIN menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo*. IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Kango, A., & Tungkagi, D. Q. (2026). Reclaiming local wisdom for religious moderation: The case of Buatulo Toulongo in Gorontalo, Indonesia. *MIQOT:*

-
- | | | | | |
|--------|-----------|------------|--------|------|
| Jurnal | Ilmu-Ilmu | Keislaman, | 50(1), | 311– |
|--------|-----------|------------|--------|------|
330. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1747>
- Kartanegara, M. (2005). *Integrasi ilmu: Sebuah rekonstruksi holistik*. Mizan.
- Kau, S. A. P. (2019). *Tafsir Islam atas adat Gorontalo: Mengungkap argumen filosofis-teologis*. Inteligensia Media.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Tiara Wacana.
- Latif, H. M., Juarta, & Elviana. (2023). *Adat bersendi syara syara bersendi kitabullah (Syara mengato adat memakai)*. PT Salim Media Indonesia.
- Laudan, L. (1977). *Progress and its problems: Towards a theory of scientific growth*. University of California Press.
- Lipoeto, M. (1949). *Sedjarah Gorontalo: Dua lima pohalaa*. Pertjetakan Ra'jat Gorontalo.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and utopia: An introduction to the sociology of knowledge*. Routledge & Kegan Paul.
- Mazidah, N., Hidayati, H. D., Salamah, W., & Prayogi, A. (2026). Harmonisasi ilmu: Paradigma keilmuan UIN KH. Abdurrahman Wahid. *An-Najah*, 5(1), 94–101. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/742>
- Nasr, S. H. (1968). *Science and civilization in Islam*. Harvard University Press.
- Nur, M. (2018). Paradigma keilmuan UIN Raden Intan Lampung. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i1.3378>
- Pettalongi, Sagaf S and Dawing, Darlis. (2022). *Integrasi Ilmu dan Agama dalam Paradigma Menara Keilmuan UIN Datokarama Palu*. In: Workshop Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis KKNI UIN Datokarama, 13 Juni 2022, Palu.
- Ridwan, W., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). Konsep Wahyu Memandu Ilmu sebagai paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Djati. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 234–242. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.404>
- Sakdiah, H., OK, A. H., Maulana, M., & Amaliah, K. (2025). Paradigma Wahdatul 'Ulum sebagai kerangka intelektual dalam pendidikan tinggi Islam di UIN Sumatera Utara. *PEMA*, 5(3), 971–980. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.2373>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Suharto, T., Abas, Z., & Faishol, A. (2017). *Gunungan ilmu: Paradigma dan kerangka kurikulum IAIN Surakarta*. Idea Press.
- Syufiyah, K., Dahlia, M., Solehka, M., & Prayogi, A. (2026). Paradigma keilmuan UIN K.H. Abdurrahman Wahid. *An-Najah*, 5(1), 196–201. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/759>
- Thahir, L. S. (2025). *Mutiara keilmuan: Paradigma integrasi ilmu UIN Datokarama Palu*. UIN Datokarama Press.
- Tungkagi, D. Q. (2026a). Menawarkan "Makuta Ilmu": Mahkota epistemologi paradigma keilmuan UIN Sultan Amai Gorontalo. <https://gopos.id/menawarkan-makuta-ilmu-mahkota-epistemologi-paradigma-keilmuan-uin-sultan-amai-gorontalo/>

Tungkagi, D. Q. (2026b). *Paradigma yang berkembang: Menempatkan "Mahkota Ilmu" sebagai proses dialektis-epistemologis*. <https://nulondalo.com/paradigma-yang-berkembang-menempatkan-mahkota-ilmu-sebagai-proses-dialektis-epistemologis/>